

**KERJA SAMA PERDAGANGAN BARANG PADA FORUM RCEP BAGI INDONESIA****(COOPERATION OF GOODS TRADING ON RCEP FORUM FOR INDONESIA)****Ragimun**

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan  
Gedung Notohamiprodo Lt 7, Jl. Dr. Wahidin no. 1 Jakarta Pusat, 10710  
E-mail: ragimun@gmail.com

Naskah diterima: 8 Desember 2017

Naskah direvisi: 15 Mei 2018

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2018

**Abstract**

*Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) was formed as a manifestation of ASEAN's response to the economic dynamics in the region as well as globally, in the format of integration of ASEAN countries with the global economy. The RCEP has a progressive goal of eliminating tariffs and non-tariff barriers, and facilitating and enhancing transparency among members. The unification of 16 countries under a free trade agreement scheme would be make the RCEP a large trading bloc, that holds one-third of the world. The objective of this study is to analyze the optimization of trade in goods with the enactment of RCEP and efforts that can be done to optimize the benefits of trade in goods for Indonesia. In this research, the economic approaches are use to emphasized the impact of RCEP formation on trade of goods for Indonesia through descriptive approach. The result of the study are, the optimization of Indonesia's medium and long-term export increase can be achieved, by the acceleration of the resolution of the RCEP negotiations, especially on three important issues, namely trade in goods, trade in services, and investment. The other efforts that should be taken were to encourage the transformation of export structures from commodity-based to value-added products and services, utilizing all existing preferences schemes regarding the opening of access market especially specific target markets requests by Indonesian delegates. Furthermore, it should always focus on economis of scale to improve trade balance and compile the negative list of export destination countries which need to be optimized such as China, Japan and South Korea.*

*Keywords: RCEP, optimization of cooperation, mutual benefit*

**Abstrak**

*Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dibentuk sebagai wujud dari respon ASEAN terhadap dinamika ekonomi di kawasan dan global berupa integrasi negara-negara ASEAN dengan perekonomian global. RCEP memiliki tujuan progresif menghapuskan tarif dan hambatan non-tarif serta memfasilitasi dan meningkatkan transparansi antar negara anggota. Penyatuan 16 negara dalam satu skema perjanjian perdagangan bebas akan menjadikan RCEP menjadi blok perdagangan besar yang menguasai sepertiga dunia. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi perdagangan barang dengan diberlakukannya RCEP dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat atas perdagangan barang bagi Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan-pendekatan ekonomi yang lebih menekankan pada dampak pembentukan RCEP terhadap perdagangan barang bagi Indonesia melalui pendekatan deskriptif. Sebagai hasilnya adalah bahwa optimalisasi peningkatan ekspor Indonesia jangka menengah dan jangka panjang akan dapat dicapai, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui percepatan penyelesaian perundingan RCEP khususnya terkait tiga isu penting yaitu isu perdagangan barang (*trade in goods*), perdagangan jasa (*trade in services*), dan investasi. Upaya-upaya lainnya adalah mendorong transformasi struktur ekspor dari berbasis komoditi menjadi produk dan jasa yang bernilai tambah, memanfaatkan seluruh skema preferensi yang ada selama ini dan *request* delegasi Indonesia terkait pembukaan akses pasar dengan menargetkan pasar secara spesifik. Demikian juga senantiasa fokus pada skala untuk membantu perbaikan neraca perdagangan serta menyusun "*negative list*" beberapa negara tujuan ekspor yang selama ini perlu dioptimalkan seperti Cina, Jepang dan Korea Selatan.*

*Kata kunci: RCEP, optimalisasi kerja sama, saling menguntungkan*

**PENDAHULUAN**

Setiap negara yang melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain tentu akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut antara lain akan meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Mereka dapat saling membantu apabila terjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu, kebutuhan setiap negara dapat tercukupi melalui kegiatan perdagangan. Bila suatu negara terjadi kekurangan barang atau produk tertentu maka dapat

dipenuhi dengan mengimpor barang dari negara yang mempunyai kelebihan hasil produksinya. Sebaliknya, negara yang mempunyai kelebihan hasil produksinya dapat mengekspor barang tersebut ke negara yang kekurangan. Dengan demikian kebutuhan setiap negara dapat tercukupi (Setiawan dan Lestari, 2011).

Pada dasarnya ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh

keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi dan adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru. Disamping itu adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang dan keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain serta munculnya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri (Sukirno, 2010).

Era revolusi globalisasi saat ini membuat dunia mengalami perubahan yang sangat cepat. Hal tersebut memberi banyak peluang dan tantangan bagi banyak negara untuk melakukan berbagai kerja sama yang saling menguntungkan (Salvatore, 2004). Salah satu di antara kerja sama antar berbagai negara adalah perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*, FTA) merupakan suatu bentuk perjanjian kerja sama perdagangan antara suatu negara atau kawasan dengan negara atau kawasan lainnya. FTA ini terbentuk sebagai kelanjutan adanya liberalisasi perdagangan Indonesia sebagai salah satu negara yang terlibat dalam perdagangan internasional yang tidak dapat dihindari. Indonesia bergabung dengan konsep FTA pertama kali tahun 2002, ketika ASEAN membentuk kerja sama ASEAN-FTA. Sampai saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan beberapa skema FTA baik regional maupun bilateral seperti ASEAN-*China* FTA (ACFTA), ASEAN-Korea FTA (AKFTA), ASEAN-India FTA (AIFTA), ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), dan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Pada bulan November 2011, ASEAN mengusulkan dan memprakarsai adanya perdagangan bebas regional (FTA) yang disebut *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) (Fukunaga, 2014).

Pembicaraan kesepakatan kerja sama RCEP relatif panjang. RCEP dibentuk sebagai upaya ASEAN mengharmonisasi sejumlah mekanisme perdagangan dengan enam mitra dagang ASEAN (Azhari. M & Widyastutik, 2016). Kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua mitra tersebut. Sampai saat ini ASEAN telah berkomitmen untuk melaksanakan 5 kesepakatan perdagangan bebas (FTA) yakni, ASEAN dengan Cina, ASEAN dengan Jepang, ASEAN dengan Korea, ASEAN *Australia New Zealand*, dan ASEAN India. Kerja sama ini dilaksanakan guna memberikan layanan dan kemudahan bagi negara mitra terutama dalam hal ekspor dan impor. Namun, permasalahan

yang muncul pada lima FTA di ASEAN tersebut adalah aturan perdagangan yang berbeda dari setiap FTA. Perbedaan aturan tersebut akhirnya membuat pelaku bisnis kesulitan untuk menggunakan berbagai kemudahan yang telah disetujui seperti proses ekspor impor, keringanan bea masuk dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan kesepakatan baru yang dapat merangkum kelima kesepakatan tersebut.

Pembentukan RCEP merupakan wujud dari respon ASEAN terhadap dinamika ekonomi di kawasan dan global yang dilandasi pilar ke empat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yaitu berupa integrasi ASEAN dengan perekonomian global. Oleh karena itu negara-negara ASEAN kemudian menginisiasi pembentukan RCEP bersama dengan negara mitra, yakni Australia, Selandia Baru, RRC, Jepang, Korea Selatan, dan India. Pembentukan RCEP ini juga dilandasi konsep dan strategi melalui konsolidasi kerja sama FTA ASEAN dengan negara mitra FTA. Diyakini pembentukan forum ini akan memberikan pengaruh positif perekonomian bagi negara-negara ASEAN dan khususnya bagi Indonesia. Potensi ekonomi yang ditimbulkan karena adanya integrasi pasar sebesar 3,2 miliar jiwa (45 persen penduduk dunia) dan kawasan ekonomi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai USD20 triliun atau 28 persen PDB dunia (Kemendag, 2014). Mengingat, mayoritas negara anggota RCEP termasuk India, RRC, ASEAN (kecuali Singapura dan Brunei) merupakan negara berkembang yang ke depan akan terus meningkat pertumbuhannya dalam percaturan perekonomian dunia. Indonesia sebagai salah satu anggota G20 diprediksi juga akan menjadi kunci perekonomian global karena mempunyai pertumbuhan PDB yang tinggi. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diproyeksikan dapat mencapai lebih dari USD5,424 triliun pada tahun 2030. (PWC, 2016)

Selain itu pembentukan RCEP juga merupakan gagasan untuk mengintegrasikan perdagangan bebas (FTA) ASEAN dengan enam negara mitra dagang, yang sebelumnya sudah terjalin kerja sama perdagangan dengan enam negara. Kerja sama tersebut antara lain ASEAN-*China Free Trade Area* (AC-FTA), ASEAN-*Japan Economic Partnership Agreement*, ASEAN-Korea FTA, ASEAN-Australia New Zealand FTA, dan ASEAN-India FTA. Gagasan awal pembentukan RCEP berasal dari Indonesia. Inisiatif tersebut dibuat berdasarkan respon ASEAN untuk menjaga ASEAN *Centrality* terhadap usulan Cina mengenai pembentukan *East Asia Free Trade Agreement* (ASEAN+3) dan usulan Jepang yang menginginkan *Closer Economic Partnership in East Asia* (ASEAN+6), tingkat liberalisasi perdagangan barang pada kerja sama perdagangan bebas ASEAN

(ATIGA) dan ASEAN+1 (AANZFTA, ACFTA, AFTA, AJCEP, AKFTA) yang mempunyai rata-rata sekitar 90 persen sehingga untuk mengoptimalkan perdagangan di kawasan regional perlu dibuat satu kerja sama perdagangan bebas di kawasan regional yang lebih luas. Namun, RCEP tidak meniadakan perjanjian kerja sama perdagangan bebas ASEAN (ATIGA) dan ASEAN+1 (AANZFTA, ACFTA, AFTA, AJCEP, AKFTA) yang telah ada tersebut.

Pada dasarnya RCEP memiliki tujuan secara progresif menghapuskan tarif dan hambatan non-tarif serta memfasilitasi dan meningkatkan transparansi antar negara anggota. Prinsip utama yang diadopsi RCEP adalah integrasi ekonomi yang lebih komprehensif yang sejalan dengan ketentuan *World Trade Organization* (WTO) dan komitmen yang lebih baik dari kerja sama perdagangan bebas ASEAN (ATIGA) dan ASEAN+1 (AANZFTA, ACFTA, AFTA, AJCEP, AKFTA) yang telah ada. Demikian juga dapat dilakukannya *Single Schedule Commitment* untuk tiap-tiap negara anggota RCEP, elemen persetujuan RCEP dapat mengacu pada kerja sama perdagangan bebas ASEAN dan ASEAN+1 serta mempertimbangkan tingkat perkembangan masing-masing negara anggota (*special and differential treatment*).

Dalam perkembangannya, kerja sama perdagangan bebas terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kriteria produk yang dapat dianggap sebagai produk negara anggota sehingga pada saat diekspor ke negara anggota lainnya, produk tersebut dapat menikmati tarif preferensi di negara anggota tujuan ekspor tersebut. Ketentuan ini disebut ketentuan asal barang atau *Rules of Origin* (ROO). Salah satu ketentuan dalam ROO yaitu *Regional Value Content* (RVC). RVC yaitu ketentuan yang mengatur mengenai batas minimal kandungan regional pada suatu produk yang diproduksi di negara anggota. Kandungan regional dapat berupa kandungan material (bahan baku), biaya-biaya produksi, dan profit dari suatu produk. Dalam sebagian besar kerja sama perdagangan bebas regional yang diikuti oleh ASEAN, ketentuan RVC umumnya adalah 40 persen. Dengan demikian RCEP akan mempermudah negara anggota untuk memperoleh pasokan bahan baku yang dapat diakumulasi sesuai ketentuan RVC 40 persen (BKF, 2017).

Manfaat lain yang diharapkan dari RCEP adalah adanya kemudahan bagi negara anggota untuk mendapatkan pasokan bahan baku terutama bagi Indonesia nantinya. Penyatuan 16 negara dalam satu skema perjanjian perdagangan bebas akan menjadikan RCEP menjadi blok perdagangan besar (sepertiga dunia) atau hampir separuh penduduk dunia. Artinya, pembentukan RCEP diharapkan

akan menjadikan kawasan regional sebagai pusat perdagangan dunia.

Namun, disamping harapan tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia khususnya agar dapat memanfaatkan pembentukan kerja sama RCEP secara optimal. Diduga dampak RCEP terbesar adalah pada kelompok produk manufaktur dan juga manfaat RCEP bagi ekspor produk Indonesia akan lebih kecil dibanding kemungkinan membanjirnya produk-produk impor dari negara lain ke Indonesia. Disisi lain produk-produk ekspor unggulan Indonesia dituntut terus melakukan efisiensi agar dapat bersaing. Insentif dan disinsentif fiskal merupakan salah satu instrumen untuk mendorong dan meningkatkan efisiensi produk-produk unggulan dalam negeri. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang dapat mengetahui dampak perdagangan barang dari pembentukan RCEP terhadap aspek-aspek fiskal di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak positif atau negatif perdagangan barang dengan diberlakukannya RCEP. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut diperoleh upaya-upaya untuk mengoptimalkan kerja sama perdagangan barang dalam forum RCEP bagi Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diketahui upaya-upaya mengoptimalkan kerja sama perdagangan barang dalam forum RCEP bagi Indonesia. Selain itu dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan terkait upaya-upaya yang menguntungkan bagi Indonesia.

## METODE

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang lebih menekankan pada pembahasan dengan cara telaah perjanjian (*agreement*) dari masing-masing jenis kerja sama termasuk telaah pembentukan RCEP terhadap perdagangan barang Indonesia. Sumber data yang dapat digunakan adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS), *Comtrade*, Bank Indonesia dan berbagai sumber data yang relevan.

Sebagai gambaran awal, profil ekonomi sebagian besar negara RCEP relatif baik. PDB nominal negara-negara anggota RCEP saat ini terus mengalami peningkatan. Total PDB negara RCEP secara keseluruhan mencapai 40 persen terhadap PDB dunia. Adapun dua besar negara yang memiliki PDB tertinggi yaitu Cina dan Jepang dengan persentase masing-masing sebesar 36 persen dan 29 persen terhadap total PDB negara RCEP di tahun 2015.

Dari profil sejarah, hampir semua negara RCEP pernah mengalami masa penjajahan, kecuali Cina, Jepang, dan Thailand. Negara yang menjadi penjajah pada negara RCEP ialah Inggris, Amerika Serikat,

Jepang, Belanda, Prancis, Portugis dan Spanyol. Di sisi lain negara RCEP memiliki keragaman dalam bahasa yang digunakan. Bahasa Inggris merupakan bahasa resmi (*official language*) pada beberapa negara seperti Australia, Filipina, Singapura, dan Selandia Baru. Penggunaan bahasa Inggris juga mengalami peningkatan seperti pada negara Korea Selatan, Thailand maupun Vietnam. Hal ini dikarenakan bahwa bahasa Inggris menjadi bahan ajar utama pada sekolah maupun perguruan tinggi di Korea Selatan, dan menjadi bahasa kedua (*secondary language*) yang banyak digunakan oleh kaum elit di Thailand dan Vietnam. Untuk Indonesia sendiri, bahasa resmi yang digunakan ialah bahasa Indonesia sedangkan untuk bahasa minoritas yang digunakan salah satunya ialah bahasa Inggris dan Belanda (Azhari M., 2016).

Hubungan kerja sama perdagangan di antara negara-negara RCEP saat ini mengalami perkembangan pasang surut. Kegagalan kesepakatan *Doha Round (Doha Development Agenda)*, telah memberikan pengaruh pada pergeseran perjanjian kearah kesepakatan-kesepakatan perdagangan bilateral ataupun regional. Peningkatan jumlah perjanjian perdagangan justru memberikan kompleksitas lain bagi Asia Pasifik seperti *trade diversion* dan *noodle bowl effect*. Inilah yang kemudian menyebabkan munculnya era baru kesepakatan regional perdagangan bebas yang lebih besar dan menyangkut regional dengan penyebaran utama pada perdagangan dunia, yang disebut *Megar Regional Trade Agreements (MRTAs)*. *Trans-Pasific Partnership (TPP)* yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dengan Cina sebagai motor utama menjadi MRTAs paling ambisius di Asia Pasifik. Dua isu dalam kedua perjanjian tersebut adalah, sebagai jalan terwujudnya integrasi Asia Pasifik dan adanya perbedaan kepentingan ekonomi antara negara besar tersebut (Junifta, 2016).

Banyaknya kerja sama internasional saat ini sering menimbulkan permasalahan dan kerumitan baru. Meningkatnya jumlah perjanjian perdagangan bebas dalam perekonomian internasional, akan menghasilkan beberapa paradoks atau berlawanan di antara beberapa mitra dagang bilateral dan multilateral. Bila hal ini diterapkan dalam perdagangan antar negara-negara Asia, maka banyak menimbulkan masalah (efek), efek ini sering disebut Efek Mangkuk Mi (*Noodle Bowl Effect*). Efek Mangkuk Mi merupakan salah satu fenomena kebijakan ekonomi internasional berupa kerumitan yang muncul setelah adanya penerapan ketentuan asal barang domestik

dalam penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antar negara. Efek ini juga merupakan dampak dari kebijakan perdagangan yang diskriminatif. Sebagai contoh barang yang sama akan dibebaskan dari tarif serta rencana pengurangan tarif yang berbeda dalam rangka kepentingan dalam negerinya.

Efek ini dilihat sebagai tindakan risiko politik bagi perusahaan-perusahaan yang hendak berinvestasi di negara-negara yang memiliki peraturan hak properti intelektual (*property right*) dan hukum kontrak yang rumit. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Jagdish Bhagwati dalam makalahnya tahun 1995, *U.S. Trade Policy: The Infatuation with Free Trade Agreements*. Bhagwati menggunakan istilah tersebut terkait persoalan perjanjian perdagangan bebas. Ia menamainya Efek Mangkuk Mi, mengacu pada proses berputarnya produk setengah jadi melewati berbagai jaringan perjanjian perdagangan bebas yang menerapkan diferensiasi tarif agar produk jadinya dapat diekspor ke negara konsumen dengan harga terendah. Ia menyebut fenomena ini seperti garis yang saling bersimpangan dan menyamakannya dengan utas spageti yang berbelit-belit dalam mangkuk. Kemudian istilah ini dipakai para ahli untuk menyebut kerumitan yang dihadapi dalam perjanjian perdagangan bebas Asia Timur ketika menyortir berbagai perjanjian dagang preferensial di antara negara-negara anggota ASEAN (*The Economist*, 2009).

Saat ini kerja sama internasional telah banyak diikuti Indonesia. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal setiap kerja sama tersebut maka perlu kehati-hatian. Sesuai *Econometric Model* menurut Laursen, 1998 dan Worz, 2005, ada empat cara untuk mendapatkan keuntungan atau mengoptimalkan perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia yaitu antara lain:

- 1) Pertukaran sukarela (*voluntary exchange*)  
Yang dimaksud pertukaran sukarela adalah bahwa perdagangan harus menguntungkan semua pihak. Secara teoritis perdagangan akan mempertemukan pelaku ekonomi yang berbeda keinginan atau kebutuhan atas produk. Hasil dari keuntungan bersama tersebut akan menjadikan perekonomian maju pesat yang biasanya diikuti berkembangnya berbagai keahlian, spesialisasi, kerja sama teknik, kerja sama sumber daya dan lain-lain,
- 2) Adanya kompetisi (*competition*)  
Adanya kompetisi mendorong setiap negara berupaya mencari teknik-teknik terbaik untuk memproduksi dan menyalurkan barang dalam jumlah, waktu, dan kualitas yang tepat guna memenangkan persaingan.

3) Skala dan cakupan ekonomi (*economies of scale and scope*)

Perdagangan yang saling menguntungkan akan terus meningkat manakala menggunakan prinsip skala ekonomis dan cakupan ekonomis. Pada dasarnya setiap negara akan mengkhususkan diri untuk memproduksi barang-barang tertentu saja, dengan harapan lebih efisien daripada jika negara yang bersangkutan memproduksi sendiri semua komponennya. Perekonomian yang melakukan spesialisasi produksi semacam ini selanjutnya berdagang dan dipertukarkan satu sama lain sesuai kebutuhannya. Sedangkan cakupan ekonomis (*economies scope*) yang diharapkan adalah pada situasi perdagangan dimana pertukaran *output* dari satu perusahaan misalnya lebih besar dibandingkan dengan *output* yang akan dicapai oleh dua perusahaan berbeda yang memproduksi barang yang sama.

4) Adanya keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*)

Perdagangan internasional akan terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara dapat mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah dibanding negara lain. Sedangkan keunggulan kompetitif terdapat empat ciri utama yang bisa membentuk lingkungan dimana perusahaan-perusahaan lokal berkompetisi, sehingga mendorong terciptanya keunggulan kompetitif. Keempat ciri tersebut meliputi:

- a. Kondisi faktor produksi (*factor conditions*), yaitu posisi suatu negara dalam faktor produksi misalnya tenaga kerja terampil, infrastruktur, dan teknologi yang dibutuhkan untuk bersaing dalam industri tertentu.
- b. Kondisi permintaan (*demand conditions*), yakni sifat permintaan domestik atas produk atau jasa industri tertentu.
- c. Industri terkait dan industri pendukung (*related and supporting industries*), yaitu keberadaan atau ketiadaan industri pemasok dan "industri terkait" yang kompetitif secara internasional di negara tersebut.
- d. Strategi, struktur dan persaingan perusahaan, yakni kondisi dalam negeri yang menentukan bagaimana perusahaan-perusahaan dibentuk, diorganisasikan, dan dikelola serta sifat persaingan domestik. (Porter, 1990)

Kerja sama pada forum RCEP diharapkan akan membawa banyak manfaat. Cina sendiri memandang RCEP merupakan jalur alternatif terbentuknya kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik. Cina dapat mengambil manfaat dari kemudahan bahan baku dan pemasaran produk-produknya. Demikian juga para negosiator dari negara anggota lainnya berharap, antara lain terlaksananya penghapusan tarif pada 95 persen dari garis tarif, adanya sebuah penjadwalan akses pasar terutama ke Cina, adanya cakupan kekayaan intelektual, investasi, perlindungan lingkungan, layanan keuangan dan standar ketenagakerjaan. Demikian juga adanya dukungan reformasi struktural dalam negeri dan adanya dukungan pembangunan infrastruktur pelabuhan, jalan, listrik dan infrastruktur lainnya serta adanya fasilitas perdagangan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan layanan administrasi bea cukai (Gantz, 2016).

## PEMBAHASAN

### Perkembangan Ekspor Impor Indonesia

Perkembangan ekspor Indonesia secara umum saat ini terus meningkat. Semester pertama tahun 2017, total ekspor (YoY) mengalami pertumbuhan positif (Lampiran 1). Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang mengalami perkembangan negatif. Dari total ekspor tersebut ada 15 jenis barang ekspor yang mempunyai perkembangan relatif tinggi. Barang-barang ekspor inilah yang akan menjadi andalan Indonesia dalam merenegosiasi dalam forum RCEP.

Beberapa barang tersebut antara lain lemak dan minyak hewan nabati (CPO), komoditi ikan kaleng dan udang, bahan bakar mineral, aneka perhiasan/permata. Demikian juga produk kendaraan dan sparepartnya serta karet dan produk karet. Selain barang-barang non migas di atas ada beberapa barang unggulan ekspor Indonesia lainnya seperti mesin-mesin/peralatan/pesawat mekanik, mesin-mesin peralatan listrik, sepatu atau alas kaki, pakaian jadi, *furniture* atau barang dari kayu, kertas/karton, produk-produk kimia dan bijih logam. Ditambah lagi beberapa produk minyak dan gas yang merupakan andalan ekspor Indonesia seperti minyak mentah, hasil minyak dan gas.

Beberapa produk ekspor unggulan Indonesia belum dapat dioptimalkan secara maksimal untuk memasuki pasar di beberapa negara anggota seperti India dan Cina karena permasalahan tarif *barrier*, berupa tingginya tarif bea masuk (Republika, 2018). Produk tersebut antara lain CPO atau minyak nabati. Demikian juga beberapa hambatan non tarif seperti standarisasi produk dan kandungan lokal

**Tabel 1.** Lima Belas Jenis Barang Ekspor (Juta USD)

Jenis Barang HS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Apr-17	May-17	Jan s.d. May 17
Lemak & minyak hewan/nabati (15)	12,219.5	16,312.2	21,655.3	21,299.8	19,224.9	21,059.5	18,652.9	18,231.7	1,807.8	1,870.9	9,927.1
Bahan bakar mineral (27)	13,934.0	18,725.7	27,444.1	26,407.8	24,780.3	21,057.8	16,013.8	14,752.5	1,792.3	1,676.4	8,429.8
Mesin/peralatan listrik (85)	8,148.1	10,432.5	11,145.4	10,764.8	10,438.4	9,745.7	8,528.8	8,134.6	654.3	733.1	3,437.6
Perhiasan/Permata (71)	1,191.8	1,456.5	2,593.5	2,888.5	2,751.3	4,648.2	5,494.9	5,663.4	555.4	450.9	2,278.9
Kendaraan dan Bagiannya (87)	1,819.3	2,728.1	3,328.6	4,856.9	4,567.2	5,213.7	5,422.7	5,867.8	543.4	631.3	2,809.1
Karet dan Barang dari Karet (40)	4,912.8	9,373.3	14,352.2	10,475.2	9,394.2	7,100.0	5,913.5	5,450.3	751.2	719.1	3,611.5
Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	4,709.3	5,071.2	5,749.5	6,103.1	5,968.5	5,969.1	5,213.0	4,640.0	406.8	585.0	2,375.7
Alas kaki (64)	1,736.1	2,501.8	3,301.9	3,524.6	3,860.4	4,108.4	4,507.0	3,879.8	400.8	465.5	2,060.2
Pakaian jadi bukan rajutan (62)	3,132.8	3,611.0	4,149.7	3,744.5	3,902.6	3,931.5	3,978.1	3,272.4	292.1	350.0	1,679.5
Kayu, Barang dari Kayu (44)	2,341.2	2,936.0	3,374.9	3,448.6	3,634.9	4,071.0	3,986.0	3,567.7	306.2	347.3	1,617.5
Kertas/Karton (48)	3,357.3	4,186.2	4,169.4	3,937.2	3,756.6	3,743.8	3,565.1	3,860.6	301.8	319.3	1,497.4
Barang-barang rajutan (61)	2,528.0	2,889.9	3,541.1	3,439.7	3,481.4	3,428.3	3,304.8	3,291.3	266.0	336.7	1,508.8
Berbagai produk kimia (38)	1,214.9	1,874.5	3,665.3	3,846.4	3,816.1	4,168.1	2,686.6	3,413.6	303.6	292.7	1,605.5
Bijih, Kerak, dan Abu logam (26)	5,804.8	8,148.0	7,342.6	5,082.6	6,544.1	1,918.6	3,378.4	6,368.7	353.5	290.9	1,107.7
Ikan dan Udang (03)	1,709.5	2,015.6	2,439.5	2,753.1	2,856.4	3,111.9	2,647.9	2,384.4	252.8	285.7	1,213.9
Lainnya	28,732.3	37,476.8	43,766.4	40,481.9	40,941.4	42,685.1	38,288.7	38,476.7	3,255.6	3,668.9	16,820.1
<b>Nonmigas</b>	97,491.7	129,739.5	162,019.6	153,054.5	149,918.8	145,960.8	131,582.1	131,255.4	12,243.4	13,023.8	61,980.2
<b>Migas</b>	19,018.3	28,039.6	41,477.0	36,977.3	32,633.0	30,331.9	18,551.9	13,089.9	1,035.8	1,267.4	6,284.2
Minyak Mentah	7,851.6	10,410.4	13,828.7	12,293.4	10,204.7	9,528.2	6,646.8	5,192.3	302.5	402.6	2,106.2
Hasil Minyak	2,231.0	3,959.7	4,776.9	4,163.4	4,299.1	3,623.3	1,766.1	860.8	146.1	128.7	682.9
Gas	8,935.7	13,669.5	22,871.5	20,520.5	18,129.2	17,180.3	10,213.0	7,036.7	587.2	736.1	3,464.4
<b>Total Ekspor</b>	116,510.0	157,779.1	203,496.6	190,031.8	182,551.8	176,292.7	150,134.0	144,345.3	13,279.2	14,291.2	68,264.4

Sumber: BKF, Kemenkeu, 2017.

produk. Tabel 1 berikut menunjukkan 15 jenis barang ekspor yang merupakan barang ekspor unggulan Indonesia saat ini.

Di kawasan ASEAN, beberapa ekspor unggulan Indonesia lima tahun terakhir antara lain ekspor produk kimia yang naik 9,88 persen, otomotif naik 14,55 persen, mesin-mesin naik 5,81 persen, dan makanan olahan naik 12,67 persen. Selain itu, produk tekstil, perhiasan, rempah, kopi dan udang pun trennya naik antara 5 sampai 28 persen.

Di sisi lain ada beberapa barang impor yang masih harus didatangkan ke Indonesia. Barang-barang komponen impor tersebut antara lain mesin-mesin/pesawat mekanik, mesin peralatan/peralatan listrik, plastik dan barang dari plastik, besi atau baja, kendaraan dan *sparepart* dari kendaraan, bahan kimia organik, gandum, benda-benda dari besi dan baja, ampas/sisa industri makanan serta kapas.

Selain itu ada beberapa produk yang masih diimpor Indonesia seperti peralatan optik, beberapa produk kimia, gula dan kembang gula, aluminium, karet dan barang dari karet. Termasuk produk migas seperti minyak mentah, hasil minyak dan gas yang nilainya cukup besar (Tempo, 2016).

Barang-barang impor inilah yang semestinya dapat dibatasi jumlah impornya untuk mengurangi pengeluaran devisa negara. Namun, bila barang-

barang ini merupakan barang modal yang masih dibutuhkan dalam negeri karena masih sulit didapat atau belum diproduksi maka forum RCEP ini dapat menjadi jembatan untuk dilakukannya negosiasi kembali terkait kontinuitas pasokan (*supply chain*) melalui kerja sama yang saling menguntungkan tersebut.

Beberapa produk yang selama ini diimpor adalah sebagaimana pada Tabel 2. Bila dilihat perkembangan impor barang, baik migas dan non migas di Indonesia ternyata berfluktuasi dari tahun ke tahun tetapi beberapa jenis barang mempunyai kecenderungan menurun. Namun, jenis barang seperti aluminium, berbagai jenis produk kimia, gandum-gandum, bahan kimia organik, kendaraan dan bagi-bagiannya, plastik dan barang dari plastik, mesin dan peralatan listrik serta mesin/pesawat mekanik mengalami kenaikan. Dilihat dari total nilai impor, ternyata banyak didominasi barang-barang non migas. Sedangkan impor barang migas baik minyak mentah, hasil olahan minyak maupun gas cenderung naik sampai tahun 2014 namun kemudian cenderung menurun di tahun 2017.

#### Perkembangan Pangsa Ekspor Negara FTA dan Non FTA

Dalam perkembangannya, pangsa ekspor negara-negara yang melakukan kerja sama perdagangan bebas (FTA) telah terjadi penurunan pangsa ekspor

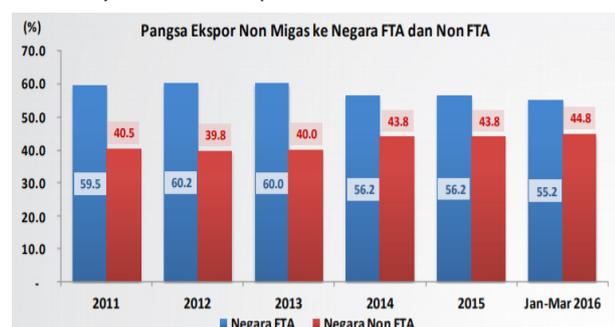
Tabel 2. Komponen Impor (Juta USD)

No	Jenis Barang HS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Apr-17	May-17	Jan s.d May-17
1	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	14,724.0	20,506.1	24,728.8	28,429.6	27,290.5	25,834.8	22,392.9	21,070.9	1,557.1	1,831.7	8,431.5
2	Mesin/peralatan listrik (85)	11,087.8	15,089.5	18,245.2	18,904.7	18,201.1	17,226.5	15,520.0	15,430.9	1,441.1	1,614.6	6,971.4
3	Plastik dan Barang dari Plastik (39)	3,216.1	4,827.0	6,687.5	6,990.9	7,642.7	7,794.3	6,830.7	6,999.8	617.9	730.3	3,189.8
4	Besi dan Baja (72)	4,356.6	6,371.5	8,580.5	10,138.9	9,553.6	8,354.4	6,316.8	6,180.1	637.2	816.2	3,080.1
5	Kendaraan dan Bagiannya (87)	3,886.6	7,377.2	7,602.8	9,757.0	7,914.8	6,253.5	5,342.5	4,790.6	563.0	557.5	2,636.6
6	Bahan kimia organik (29)	3,940.4	5,325.8	6,634.8	6,883.0	7,011.5	7,078.9	5,715.3	5,298.4	493.2	538.0	2,568.5
7	Gandum-gandum (10)	1,506.2	2,159.2	4,753.1	3,714.4	3,621.4	3,605.9	3,153.4	2,931.6	230.4	298.5	1,114.9
8	Benda-benda dari Besi dan Baja (73)	2,784.1	3,451.0	3,573.3	4,889.6	4,747.7	4,293.0	3,591.8	2,096.2	146.2	203.3	931.5
9	Ampas/Sisa Industri Makanan (23)	1,678.8	1,870.8	2,219.2	2,798.1	3,042.1	3,273.8	2,734.6	1,911.2	242.2	287.8	1,060.2
10	Kapas (52)	1,313.4	1,794.6	1,812.3	2,168.4	2,353.1	2,070.0	1,919.0	2,479.9	188.9	221.1	993.6
11	Perangkat optik (90)	1,476.1	2,232.1	3,169.1	2,513.8	2,554.8	2,499.6	2,122.7	1,202.9	170.5	198.0	837.6
12	Berbagai produk kimia (38)	1,073.6	1,472.9	1,697.3	1,803.1	2,103.0	2,074.6	1,884.6	2,353.5	169.9	203.5	935.1
13	Gula dan Kembang Gula (17)	704.6	1,252.8	1,900.3	1,884.9	1,983.2	1,567.5	1,498.2	1,703.6	227.0	215.5	982.2
14	Aluminium (76)	237.4	523.2	776.0	840.5	756.8	633.1	666.5	1,420.2	147.6	177.4	752.7
15	Karet dan Barang dari Karet (40)	1,125.3	1,670.7	2,346.7	2,624.2	2,212.9	2,005.3	1,685.3	1,412.4	158.1	186.4	767.5
16	Lainnya	24,130.2	31,445.8	40,195.6	43,006.8	39,382.3	38,964.7	20,075.3	37,827.1	3,308.0	3,916.9	17,069.9
17	Nonmigas	77,848.5	108,250.6	136,734.0	149,126.8	141,362.3	134,718.9	102,794.7	116,881.0	10,298.4	11,996.9	52,323.0
18	Migas	18,980.8	27,412.7	40,701.5	42,564.2	45,266.4	43,459.9	39,929.9	18,738.4	1,646.8	1,820.3	10,045.3
19	Minyak Mentah	7,372.7	8,535.4	11,154.5	10,803.3	13,585.8	13,072.4	8,063.2	6,730.6	426.1	529.0	2,605.7
20	Hasil Minyak	11,118.9	18,014.0	28,134.6	28,679.4	28,567.6	27,362.5	14,536.9	10,324.2	1,045.7	1,108.0	6,336.2
21	Gas	489.1	863.2	1,412.5	3,081.6	3,113.0	3,025.0	2,013.0	1,669.1	175.0	183.3	1,103.4
22	Total Impor	96,829.2	135,663.3	177,435.6	191,691.0	186,628.7	178,178.8	142,734.2	135,619.4	11,945.2	13,817.2	62,368.2

Sumber: BKF, Kemenkeu, 2017.

dan nilai ekspor non migas ke negara FTA dan non FTA. Hal ini memberikan indikasi bahwa tidak serta merta negara-negara yang telah melakukan kerja sama perdagangan kemudian memberikan nilai positif untuk meningkatkan ekspor secara otomatis. Gambar 1 menunjukkan terjadinya penurunan pangsa pasar (*market share*) dari 2011 sampai dengan 2016. Namun di sisi lain negara-negara yang tidak melakukan kerja sama perdagangan bebas (non FTA) justru mengalami kenaikan. Hal ini menjadi tantangan bagi para pengambil keputusan untuk bergabung atau tidak, senantiasa mempertimbangkan kerja sama dengan berbagai negara baik bilateral maupun multilateral.

Penurunan pangsa pasar pada negara-negara yang melakukan kerja sama perdagangan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus melakukan perundingan perdagangan internasional dalam rangka membuka akses pasar dan *open economy*. Rencana pembentukan forum RCEP ini



Sumber: Kemendag, 2017

Gambar 1. Pangsa Ekspor Non Migas ke Negara FTA dan Non FTA

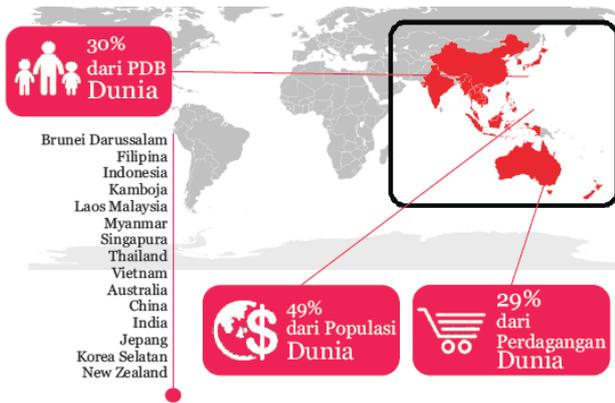
dituntut untuk dapat membuktikan keberhasilan dan harapan kerja sama ini.

### Potensi Indonesia dalam RCEP

RCEP merupakan salah satu inisiatif untuk menggabungkan negara-negara ASEAN dengan 6 mitra ASEAN dalam sebuah perjanjian perdagangan bebas. Hal ini dimaksudkan sebagai proses negosiasi yang akan menciptakan kawasan mega blok perdagangan yang akan berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia terutama di kawasan Asia.

Pembentukan blok RCEP diperkirakan akan mempunyai potensi transaksi perdagangan yang lebih luas dari sekedar perdagangan barang, yaitu termasuk perdagangan transaksi jasa-jasa. Sebagian besar dari isi perjanjian akan memberikan negara-negara maju dan perusahaan akan mempunyai alternatif untuk mengagendakan isu selain dari kesepakatan perdagangan tetapi juga mempunyai implikasi luas terhadap berbagai sektor di masyarakat. Bila kesepakatan RCEP berlaku maka lebih dari 30 persen PDB dunia atau potensi pasarnya sebesar USD21,6 triliun akan berada di kawasan ini. Sekitar 50 persen populasi dunia juga berada di kawasan RCEP ini. Hal ini berarti potensi konsumen atau pasar sangat menjanjikan. Ditaksir hampir 30 persen perdagangan dunia akan berada di kawasan ini. Bila hal itu terjadi maka dapat diilustrasikan sebagaimana Gambar 2.

Pembentukan forum RCEP tentu saja akan mempunyai konsekuensi timbulnya efek positif dan



Sumber: Kemenperin, 2016  
**Gambar 2.** Potensi RCEP

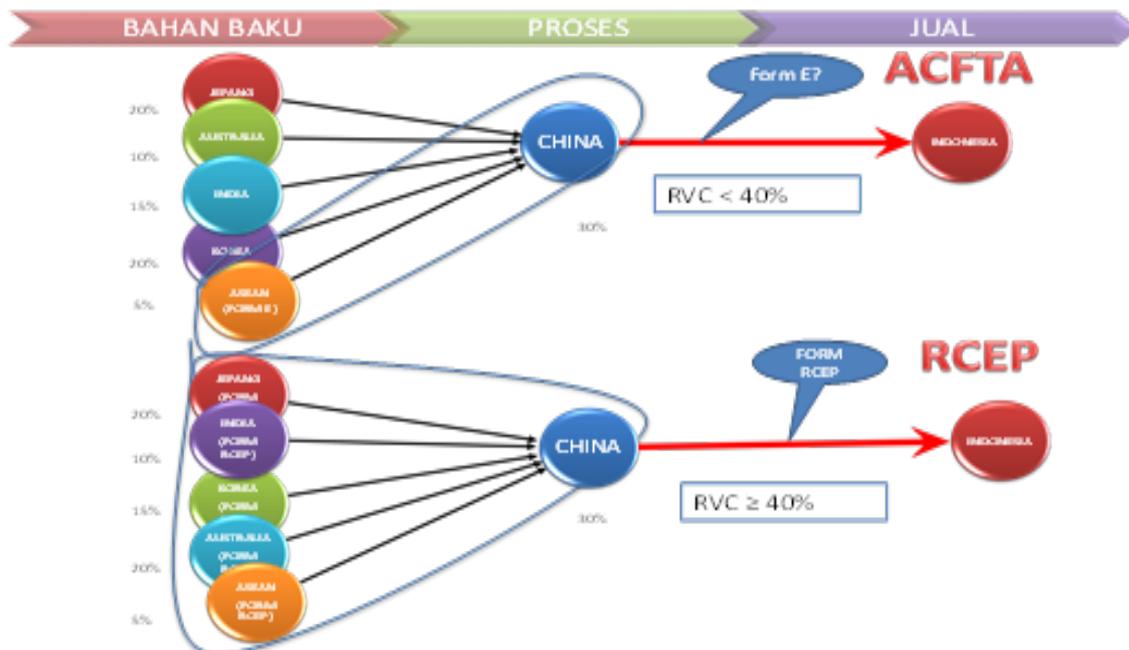
negatif bagi para anggotanya. Bagi Indonesia, beberapa efek negatif yang ada harus segera dapat diselesaikan guna memanfaatkan forum RCEP secara optimal. Salah satu konsep dan pandangan serta harapan Indonesia terhadap penyatuan 16 negara dalam RCEP ini adalah dapat mengurangi efek *mangkok mi (noodle bowl effect)* yang diakibatkan oleh banyaknya kerja sama perdagangan bebas yang diikuti oleh suatu negara, karena RCEP tidak menghilangkan kerja sama perdagangan bebas regional yang ada, RCEP cenderung menambah satu rantai *mi* yang baru lagi. Disamping itu, RCEP pada dasarnya tidak menyebabkan adanya penambahan pasar baru di kawasan regional ASEAN. Pasar baru yang tercipta hanya terjadi antar negara mitra ASEAN (Australia, Cina, India, Jepang, Korea, dan Selandia Baru).

Di sisi lain terbukanya akses pasar dengan negara mitra ASEAN diharapkan akan dapat meningkatkan perdagangan intra negara mitra ASEAN sehingga

berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kawasan regional pada umumnya dan ASEAN pada khususnya. Salah satu manfaat lain yang diharapkan dari bergabungnya 16 negara dalam RCEP ini adalah adanya kemudahan bagi negara anggota RCEP untuk mendapatkan pasokan bahan baku.

Salah satu hal yang disepakati dalam kerja sama perdagangan bebas terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kriteria produk yang dapat dianggap sebagai produk negara anggota sehingga pada saat diekspor ke negara anggota lainnya, produk tersebut dapat menikmati tarif preferensi di negara anggota tujuan ekspor tersebut. Ketentuan ini disebut ketentuan asal barang atau *Rules of Origin (ROO)*. Salah satu ketentuan dalam ROO yaitu *Regional Value Content (RVC)*. RVC merupakan ketentuan yang mengatur mengenai batas minimal kandungan regional pada suatu produk yang diproduksi di negara anggota. Kandungan regional tersebut dapat berupa kandungan material (bahan baku), biaya-biaya produksi, dan profit dari suatu produk. Sebagian besar kerja sama perdagangan bebas regional yang diikuti ASEAN, pada umumnya ketentuan RVCnya adalah 40 persen. Sehingga kerja sama RCEP ini diharapkan akan mempermudah negara anggota memperoleh pasokan bahan baku yang dapat diakumulasi dapat memenuhi ketentuan RVC 40 persen. Ilustrasi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.

Sebagai ilustrasi, Gambar 3 membandingkan dua skema kerja sama perdagangan bebas yaitu ACFTA dan RCEP. Pada kerja sama perdagangan bebas ACFTA, kandungan regional yang dapat



Sumber: Kemendag/BKF, Laporan RCEP ke 12 di Perth Australia, 2017.  
**Gambar 3.** Skema Kerja Sama Perdagangan ACFTA dan RCEP

Tabel 3. Produk Unggulan Indonesia di Negara Mitra

No	Komoditi	Negara Tujuan	Tarif di Negara Mitra	Ekspor 2012-2015 (Juta USD)
1	Palm Oil	China	9%	6.162
2	Palm Stearin	China	8%	1.317
2	Karet (TNSR)	China	20%	3.528
3	Plywood	China	5-10%	1.720
4	Styrene	China	2%	312
5	Kertas	China	5%	230
6	Komponen Kendaraan bermotor	China	5%	123
7	Palm Oil	India	80%	9.854
8	RBD Palm Oil	India	90%	5.001
9	Karet (TNSR)	India	20%	1.199
10	Palm Kernel Oil	India	100%	634
11	Fatty Acid	India	15%	276
12	Kopi	India	100%	126
13	Palm olein	India	80%	114
14	Terephthalic acid	India	8%	110
15	Plywood	Jepang	10%	2.818
16	Sepatu	Jepang	2,20%	588
17	Olahan Tuna	Jepang	6,30%	168
18	Ikan Tuna segar	Jepang	3,50%	127
19	Ikan Tuna beku	Jepang	3,50%	103
20	Lubricating base oil	Korea	5%	794
21	Plywood	Korea	5-10%	353
22	Stearic acid	Korea	5%	181

Sumber: BPS, data 2012 – 2015.

diperhitungkan dalam RVC hanyalah bahan baku dari negara ASEAN dan nilai tambah yang terjadi di Cina. Sedangkan dalam RCEP, kandungan regional dapat dilakukan terhadap seluruh bahan baku impor dan nilai tambah yang terjadi di Cina. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perdagangan intra negara anggota RCEP termasuk Indonesia.

Dari sisi perdagangan barang, ada sejumlah potensi barang ekspor unggulan Indonesia yang dapat masuk ke beberapa negara mitra RCEP, walaupun barang-barang ini bukan merupakan produk *high technology* namun sebagian merupakan produk manufaktur, antara lain minyak nabati dari CPO, karet dan produk karet, *plywood*, *foot wear*, beberapa produk olahan ikan dan lain-lain. Selama ini negara tujuan produk-produk utama ini adalah Cina, India, Jepang dan Korea Selatan.

Bila dilihat perjanjian sebelumnya yaitu kerja sama ekonomi antara ASEAN dan Cina (ACFTA) yang dilakukan tahun 2004 di Phnom Penh, Kamboja mempunyai beberapa tujuan. Tujuan utama perjanjian ACFTA antara lain (1) memperkuat dan meningkatkan kerja sama perdagangan kedua pihak; (2) meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan tarif; (3) mencari area baru dan mengembangkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak; dan (4) memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak. Namun, kenyataannya perjanjian inipun masih banyak kendala-kendala yang dihadapi.

Kendala-kendala yang paling banyak dialami adalah tarif *barrier* yaitu masih tinggi. Tingginya tarif di negara-negara tujuan ekspor yang masih berkisar di atas 5 persen. Tarif produk karet ke Cina 20 persen, *plywood* antara 5 sampai dengan 10 persen. Untuk produk *palm oil* di negara India masih tinggi sekitar 80 sampai dengan 100 persen. Bahkan, *Palm Kernel Oil* dan kopi mencapai 100 persen. Tingginya tarif di negeri ini karena beberapa sebab antara lain, upaya memproteksi produk dalam negeri India karena negeri inipun memproduksi produk yang sama. Demikian juga Korea Selatan dan Cina. Pembahasan untuk menurunkan tarif ini akan terus dilakukan termasuk dalam forum RCEP ini.

Tabel 3 menunjukkan beberapa produk unggulan ekspor Indonesia ke negara mitra. Dari Tabel 3 tersebut, produk CPO merupakan barang ekspor unggulan Indonesia yang mempunyai peluang dapat ditingkatkan ekspornya. Produk ekspor ini terus meningkat jumlah produksinya karena saat ini makin meluasnya lahan-lahan kelapa sawit. Demikian juga karet dan produk asal karet yang merupakan produk yang melimpah di Indonesia walaupun harganya juga berfluktuasi serta kekhawatiran produsen karet karena adanya persaingan penggunaan karet sintesis yang makin meningkat

#### Optimalisasi Kerja sama Perdagangan Barang Forum RCEP

Di sisi lain terdapat juga ancaman nyata bergabungnya Indonesia dalam RCEP yaitu adanya pemberlakuan kesepakatan untuk menghilangkan

barier keluar masuknya barang melalui penurunan tarif impor, hal ini akan berakibat dalam jangka pendek (*short term*) terjadinya penerimaan negara dari sektor perpajakan akibat penurunan tarif impor tersebut. Namun disisi lain perusahaan pengguna bahan baku tersebut akan dapat menikmati penurunan tarif bea masuk impornya dan akan dapat menekan harga produknya menjadi lebih murah sehingga pada akhirnya akan makin efisien dan dapat bersaing.

Data BPS menyatakan bahwa peningkatan ekspor dan impor Indonesia sampai dengan Maret 2017, nilai ekspor naik sebesar 15,68 persen sedangkan nilai impor meningkat 17,56 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Data BPS juga mengungkapkan bahwa Cina merupakan negara yang paling aktif atau mendominasi perdagangan dengan Indonesia baik impor maupun ekspornya. Termasuk Jepang dan Korea Selatan. Negara-negara ini merupakan mitra kerja sama RCEP.

Peluang dan ancaman pembentukan RCEP yang perlu diwaspadai adalah ASEAN terutama Indonesia karena adanya penurunan preferensi produk Indonesia di negara mitra ASEAN (*export preferential erosion*). Dengan adanya RCEP akan menyebabkan preferensi yang selama ini dinikmati oleh ASEAN pada salah satu negara mitra akan juga dapat dinikmati oleh negara mitra ASEAN lainnya. Perubahan tersebut akan memperlihatkan preferensi produk ASEAN di Cina yang diperoleh melalui kerja sama ACFTA menjadi berkurang karena negara mitra ASEAN lainnya juga akan mendapatkan preferensi di Cina melalui kerja sama RCEP. Produk ekspor Indonesia yang sebelumnya menikmati preferensial tarif di Cina akan bersaing dengan produk dari Australia, India, Jepang, Korea, dan Selandia Baru di pasar Cina dengan tingkat preferensi yang sama. Dengan demikian agar memaksimalkan ekspor Indonesia ke negara mitra lainnya diperlukan negosiasi guna meningkatkan perluasan pasar melalui penurunan preferensi produknya juga.

Ancaman dan kekhawatiran RCEP lainnya adalah mengatur secara ketat tentang liberalisasi perdagangan barang, jasa, belanja pemerintah, *e-commerce*, perlindungan hak kekayaan intelektual, paten atas obat-obatan, hak cipta, indikator geografis, sumber daya genetika, benih, dan lain-lain termasuk mengatur perlindungan dan penyelesaian sengketa dalam berinvestasi. RCEP sebagai kawasan FTA akan melanjutkan kebijakan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi di berbagai sektor. Perjanjian semacam ini akan mendorong berbagai negara berlomba mengundang investasi asing dengan menyajikan lingkungan bisnis yang semakin menarik bagi korporasi dan sebaliknya semakin menguras sumber-sumber daya alam yang ada.

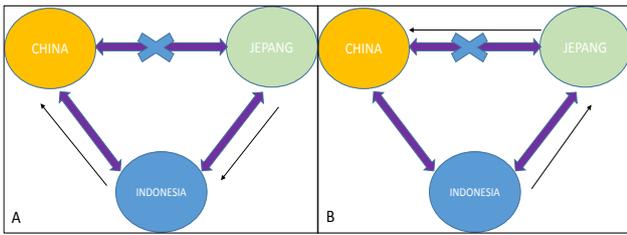
Dalam perkembangannya perundingan dan pembahasan khususnya mengenai perdagangan barang (*trade in good*) masih memfokuskan pembahasan permintaan dan penawaran (*request and offer*). Akses pasar baru dalam RCEP hanya akan diperoleh masing-masing negara mitra ASEAN di negara mitra ASEAN lainnya. Hal ini menyebabkan perundingan RCEP pada dasarnya adalah perundingan antar negara mitra ASEAN. Karena antar beberapa negara mitra belum memiliki kerja sama perdagangan bebas, hal inilah yang kemudian menjadikan perundingan berlangsung lambat. Untuk mempercepat jalannya perundingan, disepakati adanya *Basic Concept of Initial Offer* (BCIO).

BCIO berisi antara lain target liberalisasi adalah 85 persen, negara mitra memperoleh kemudahan dalam menyusun produk yang akan diliberalisasikan dalam RCEP melalui 3 tingkat (*tier*) yaitu *tier 1* adalah yang paling liberal dan ditujukan bagi negara ASEAN, *tier 2* kurang liberal dan ditujukan untuk sesama negara mitra yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan bilateral, dan *tier 3* paling konservatif dan ditunjukkan untuk sesama negara mitra yang belum memiliki kerja sama perdagangan bebas.

Pada beberapa perkembangan lainnya, para wakil Delegasi Republik Indonesia (Delri) menyampaikan *concern* nya terkait *offer list* dari negara mitra tersebut. Dengan kondisi *offer list* negara mitra, maka akan sulit bagi Indonesia untuk dapat memenuhi BCIO karena kecilnya dampak positif RCEP bagi Indonesia. Karena itu, untuk menyeimbangkan posisi antara negara mitra dan ASEAN, Indonesia meminta kepada negara mitra untuk mempertimbangkan secara serius harapan atau permintaan Indonesia dalam rangka RCEP ini. Dalam menyusun *request list* ini, agar dapat dioptimalkan manfaat bagi Indonesia untuk dapat dinegosiasi secara langsung, dapat membuka akses pasar produk-produk unggulan Indonesia di pasar negara mitra. Produk-produk unggulan Indonesia antara lain sebagaimana Tabel 3.

Manfaat terbesar lainnya dari RCEP adalah kemudahan akses mendapatkan bahan baku guna memenuhi RVC. Sebagai contoh, saat ini Indonesia masih banyak mengimpor tekstil dan produk tekstil, serta asesoris dari Cina untuk keperluan industri tekstil dan produk tekstil. Demikian juga industri makanan dan minuman masih mengimpor garam industri dari Cina. Termasuk beberapa bahan penolong dan mesin-mesin serta *sparepart* juga bisa diimpor dari Cina, Jepang maupun Korea Selatan untuk keperluan industri manufaktur di Indonesia.

Mekanisme *tier* seperti tersebut di atas menyebabkan manfaat tersebut tidak dapat secara optimal dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN.



Sumber: Kemendag/BKF Laporan RCEP ke 12 di Perth Australia, 2017.

**Gambar 4.** Ilustrasi Kemungkinan Posisi Indonesia dalam Rantai Pasok Barang RCEP

Gambar 4 mengilustrasikan 2 kemungkinan posisi Indonesia dalam rantai pasok barang di RCEP.

Keberadaan mekanisme tingkat (*tier*) dapat menyebabkan komitmen Cina ke Jepang berbeda dengan komitmen Cina ke Indonesia. Bila Cina tidak membuka produk kendaraan bermotor dengan Jepang namun membuka produk dengan Indonesia, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi.

Pada Gambar 4A, Jepang akan mengekspor produk kendaraan bermotor dalam keadaan terurai ke Indonesia untuk kemudian dirakit. Produk mobil jadi kemudian di ekspor oleh Indonesia ke Cina. Skenario ini akan menguntungkan bagi Indonesia hanya jika Indonesia berada pada sisi hilir dari rantai pasok dan diperbolehkan adanya penumpukan (*cumulation*) kendaraan bermotor terurai yang diimpor Indonesia dari Jepang tersebut dengan nilai tambah yang terjadi di Indonesia.

Pada Gambar 4B, jika Indonesia menjadi pemasok komponen kendaraan bermotor bagi industri kendaraan bermotor di Jepang, maka Indonesia tidak akan mendapatkan tambahan permintaan dari Jepang karena akses pasar Jepang ke Cina untuk kendaraan bermotor tertutup.

Jika mekanisme *tier* ini akan tetap dipertahankan, maka selayaknya ASEAN juga dapat menggunakan mekanisme yang sama untuk mengurangi potensi terjadinya *early harvest liberalisation* (percepatan liberalisasi) dan jika tidak, maka ASEAN perlu menuntut kompensasi dari diterapkannya mekanisme ini.

Selanjutnya beberapa upaya secara garis besar yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat kerja sama RCEP khususnya bagi Indonesia yang dapat diagendakan antara lain adalah :

- 1) Upaya peningkatan ekspor jangka menengah. Salah satu upaya peningkatan ekspor jangka menengah dapat dicapai juga dengan mempercepat penyelesaian perundingan RCEP khususnya terkait tiga isu penting yaitu isu perdagangan barang (*trade in goods*), perdagangan jasa (*trade in services*), dan investasi.
- 2) Mempertahankan dan meningkatkan akses ke pasar tradisional seraya membuka akses ke pasar-pasar non tradisional.

- 3) Mendorong transformasi struktur ekspor dari berbasis komoditi ke produk dan jasa bernilai tambah. Demikian juga meningkatkan kontinuitas "*supply chains*"  
 Dengan masuknya keanggotaan RCEP, Indonesia dituntut untuk melakukan transformasi struktur ekspor yang selama ini masih berbasis komoditi alam dan beberapa produk hasil olahan sederhana, ke depan didorong untuk dapat memproduksi barang-barang dan jasa yang mempunyai nilai tambah sehingga dapat bersaing dengan yang sama dari negara Asean lainnya. Di samping itu terus ditingkatkan kontinuitas rantai pasokan untuk memenuhi produksi nasional.
- 4) Memanfaatkan secara penuh skema preferensi yang ada selama ini berupa beberapa perjanjian antara lain AEC, ASEAN+1s, IJEPA, INA-PAK FTA, dan lainnya.  
 Salah satu contohnya adalah dengan mendorong implementasi hasil kesepakatan terkait pemberian fleksibilitas yang seluas-luasnya terhadap definisi *through Bill of Lading* (B/L) serta kesepakatan untuk tidak menolak pemberian tarif preferensi bagi barang yang mengalami proses pengangkutan transit melalui negara antara dengan menggunakan B/L atau dokumen pengangkutan multi moda sebagai dokumen tambahan yang diperlukan menurut aturan dalam perjanjian IX ROO AKFTA.
- 5) Menargetkan pasar secara spesifik, fokus pada skala untuk membantu perbaikan neraca perdagangan.  
 Peluang untuk menemukan pasar spesifik pada forum RCEP sangat besar dan mempunyai kesempatan untuk menawarkan ke negara mitra juga sangat dimungkinkan. Ada sejumlah barang unggulan yang dapat ditingkatkan pasar spesifik di negara mitra seperti barang-barang hasil olahan ikan dan udang yang dapat ditawarkan ke mitra Jepang. Demikian juga barang hasil olahan tambang yang dapat dibuka aksesnya ke pasar Cina. Peningkatan ekspor barang-barang ini dalam rangka membantu perbaikan neraca perdagangan yang saat ini mengalami defisit. Peluang beberapa komoditas Indonesia dapat masih terus tumbuh dan berkembang. Seperti pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Saat ini komoditas TPT Cina dan Vietnam sudah

dikenakan bea masuk 0 persen, sedangkan ekspor produk TPT Indonesia ke Amerika maupun Eropa masih dikenai bea masuk antara 5-20 persen. Dengan pembebasan bea masuk ini sebenarnya industri TPT Indonesia akan semakin kuat. Peluang juga berasal dari Australia yang meminta kepada Indonesia agar tiga komoditasnya bisa bebas bea masuk. Komoditas tersebut adalah produk susu (*skim milk* dan *skim milk powder*), *copper cathode*, serta baja (*hot rolled coil* dan *cold rolled coil*). Sebagai keseimbangannya Australia memberi tawaran bea masuk nol persen untuk tiga komoditas potensial Indonesia yaitu produk tekstil, *footwear* (alas kaki), dan *clothing* (pakaian). Usulan Australia itu dapat digunakan skema *user specific duty free scheme* (USDFS), yang berarti preferensi tarif 0 persen dapat diberikan bila ada investasi yang masuk Indonesia. Dengan demikian, nilai tambah akan meningkat dan terdapat transfer teknologi di samping itu Indonesia dapat melakukan ekspor ke negara lain. (Kontan, 12 Oktober 2017)

6) Menyusun “*negative list*” negara-negara tujuan ekspor

Menyusun daftar negatif negara tujuan ekspor potensial seperti Cina, India, Korea Selatan, Jepang, Australia dan Selandia Baru dengan maksud untuk mengetahui kelemahan dan potensi masuknya produk-produk unggulan Indonesia ke negara-negara tersebut sehingga dapat ditawarkan dalam negosiasi kerja sama tersebut. Salah satu diantaranya adalah hambatan tarif, ada beberapa komoditi yang masih mempunyai tarif tinggi seperti CPO di India. Termasuk hambatan non tarif untuk masuk pasar di beberapa negara misalnya berupa standarisasi barang tertentu sebagai cara menghambat untuk masuk karena kebijakan proteksi terselubung. Sebagai salah satu bentuk upaya dan langkah antisipatif Indonesia adalah dengan menerapkan ketentuan pada beberapa bidang misalnya di bidang kesehatan (*sanitary*), *special product*, *codex alimentarius*, serta produk bersertifikat segar dan halal. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat daya saing produk nasional. Namun demikian penerapan *non-tariff barrier* ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan aksi balasan (*retaliation*). Oleh karena itu dengan langkah simultan, terukur, konsisten, dan antisipatif, Indonesia dapat mengambil manfaat dari RCEP tersebut.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kerja sama RCEP mempunyai potensi transaksi yang lebih luas tidak sekedar perdagangan barang, tetapi juga transaksi jasa-jasa dan investasi. Sebagian besar dari isi perjanjian akan memberikan negara-negara maju seperti Cina, Jepang dan Korea Selatan mempunyai alternatif untuk mengagendakan kesepakatan tidak hanya perdagangan tetapi juga mempunyai implikasi luas terhadap berbagai sektor industri dan berbagai usaha di masyarakat. Dengan demikian bila kesepakatan RCEP berlaku maka lebih dari 30 persen PDB dunia atau potensi pasarnya sebesar USD21,6 triliun akan berada di kawasan ini. Sekitar 50 persen populasi dunia juga berada di kawasan RCEP ini. Hal ini berarti peluang dan potensi konsumen atau pasar bagi Indonesia sangat besar.

Dalam hal perdagangan barang dikhawatirkan banyak membanjirnya produk-produk manufaktur negara mitra ke Indonesia karena produk Indonesia masih didominasi produk-produk alam/mentah. Namun ada beberapa produk unggulan yang dapat ditawarkan ke negara mitra sebagai *bargaining power* agar dilakukan pembukaan akses pasar barang-barang Indonesia ke negara-negara mitra tersebut.

Salah satu keuntungan forum RCEP bagi Indonesia akan dapat diperoleh jika terjadi pembukaan akses pasar barang ekspor pada negara-negara mitra dan kelancaran pasokan bahan baku yang belum dapat dipenuhi di dalam negeri untuk kebutuhan industri domestik. Hal ini yang menjadi urgen untuk dinegosiasikan dalam forum tersebut, maka diperlukan negosiator yang handal. Salah satu upaya peningkatan ekspor terutama jangka menengah dapat dicapai yaitu dengan mempercepat penyelesaian perundingan RCEP khususnya terkait tiga isu penting yaitu isu perdagangan barang (*trade in goods*), perdagangan jasa (*trade in services*), dan investasi.

Selain itu mendorong transformasi struktur ekspor dari berbasis komoditi ke produk dan jasa bernilai tambah, memanfaatkan secara penuh skema preferensi yang ada selama ini berupa beberapa perjanjian antara lain AEC, ASEAN+1s, IJEPA, INA-PAK FTA, dan lainnya sebelum kesepakatan RCEP terwujud. Salah satu optimalisasinya adalah menargetkan pasar secara spesifik, fokus pada skala untuk membantu perbaikan neraca perdagangan serta menyusun “*sin list*” negara-negara tujuan ekspor yang selama ini perlu dioptimalkan seperti Cina, Jepang dan Korea Selatan.

Salah satu usulan guna menyeimbangkan posisi tawar antara negara mitra dan negara anggota ASEAN antara lain karena besarnya potensi pasar dan melimpahnya bahan mentah maka

sebaiknya meminta kepada negara mitra untuk mempertimbangkan secara serius *request* dari Indonesia. Sehingga diharapkan delegasi Indonesia dapat secara langsung meminta kepada negara mitra agar membuka akses pasar produk-produk unggulan Indonesia di pasar negara mitra tersebut. Hal ini disebabkan kondisi *offer list* negara mitra akan sulit dapat dipenuhi Indonesia terkait ketentuan BCIO yang kurang berdampak positif bagi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Porter, Michael E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. London: The Macmillan Press Ltd
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salvatore, Dominick. 2004. *International Economics*. Eleventh Edition, Fordham University, USA : John Wiley & Sons, 133.
- Setiawan, H. Lestari, S. 2011. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.

### Jurnal

- Azhari M. & Wiyastutik. 2016. Determinan dan Ekuivalen Tarif Jasa Finansial dan Asuransi Negara RCEP. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 10 No. 2 Desember 2016, 147-166.
- Fukunaga, Yoshifumi. 2014. ASEAN's Leadership in the Regional Comprehensive Economic Partnership. *Asia and the Pacific Policy Studies*. Wiley Publishing Asia Pty Ltd and Crawford School of Public Policy at The Australian National University, Vol. 2, No 1, 103-115.
- Gantz A. David. 2016. The TPP and RCEP: Mega Trade Agreement for Asia Pacific Rim. *Arizona Journal of International and Comparative Law*. Vol. 33 No. 1. 2016, 63-64.
- Jagdish Bhagwati. 1995, "U.S. Trade Policy: The Infatuation with Free Trade Areas" in Jagdish Bhagwati and Anne O. Krueger. *The Dangerous Drift to Preferential Trade Agreements*, The AEI Press, 1-18.
- Junifta, Y. Dhenny. 2016. Trans Pasific Partnership (TPP) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Upaya Integrasi Asia Pasifik dan Kompetisi Negara Hegemon Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 5 No. 2, Semester Genap tahun 2016/2017, 278-285.

### Sumber Digital

- GTAP (Global Trade Analysis Project). 2003. Diunduh tanggal 12 September 2017, dari <http://www.gtap.org>
- Kementerian Perindustrian. 2017. Berita Industri Potensi Pasar RCEP. Diunduh tanggal 1 Agustus 2017 jam 14:23, dari <http://www.kemenerperin.go.id/artikel/10281/Potensi-Pasar-RCEP>
- Koran Kontan. 2017. RI-Australia Jajaki Tarif Bea Masuk 0 Persen Untuk 3 Komoditis, tanggal 12 Oktober 2017. Diunduh tanggal 16 Oktober 2017 jam 16:21, dari <http://industri.kontan.co.id/news/ri-australia-jajaki-tarif-bm-0-untuk-3-komoditas>
- Meilani, Erika. 2008. Analisis Dampak Perdagangan Bebas Indonesia Jepang dengan Pendekatan Global Trade Analysis Project (GTAP). Tesis. Program Studi Ilmu Ekonomi, Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok. Diunduh pada tanggal 4 September 2017 jam 10:34, dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/133328-T%2027385%20Analisis%20dampak%20perdagangan.pdf>
- Pemprov Sumatera Barat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2017. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Diunduh pada tanggal 30 Agustus 2017 jam 10:23, dari <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/4951>
- Pricewaterhouse Coopers (PwC). 2016. Sepuluh Negara dengan Ekonomi Terkuat 2030, RI Nomor Berapa. Diunduh pada tanggal 18 April 2018 jam 11.12, dari <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesian/10-negara-dengan-ekonomi-terkuat-2030--ri-nomor-berapa-.html>
- Puslitbang Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2009. Kajian Dinamika dan Proyeksi Ekspor Indonesia ke Beberapa Negara Mitra Dagang Utama. Diunduh pada tanggal 9 September 2017 jam 13:23, dari <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/01/06/DinamikaProyeksi.pdf>
- Republika. 2018. Indonesia Harus Buka Pasar Baru Sawit , tanggal 2 Pebruari 2018, Diunduh tanggal 29 April 2018 jam 13.15, dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/18/02/04/p3mnr453-indonesia-harus-buka-pasar-baru-sawit>
- The Economist. 2009. Why Trade Agreements are All The Rage in Asia, Asian Trade, The Noodle Bowl, Sept 3,2009. Diunduh pada tanggal 20 Agustus 2017 jam 14:45, dari <http://www.economist.com/node/14384384>

- Tempo. 2016. Ekspor Unggulan Indonesia ke MEA. 7 Januari 2016. Diunduh tanggal 23 April 2018 Jam 08.29, dari <https://bisnis.tempo.co/read/734042/inilah-ekspor-unggulan-indonesia-ke-mea>
- Kementerian Perdagangan. 2014. Analisis Jasa ICT dalam Kerjasama RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). Jakarta: Pusat Kebijakan Kerja sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.

**Sumber Lain**

- Badan Kebijakan Fiskal (BKF). 2017. Lampiran Bahan Nota Dinas Laporan RCEP 12 Perth tahun 2017.

**Lampiran 1****Pertumbuhan Total Ekspor Indonesia (%YoY)**

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2007	10.1%	10.4%	13.9%	14.6%	15.2%	14.8%	14.5%	13.6%	12.9%	13.4%	13.1%	13.2%
2008	34.5%	31.6%	31.7%	29.3%	29.8%	30.6%	29.7%	29.7%	29.6%	26.9%	24.1%	20.0%
2009	-35.0%	-33.7%	-31.6%	-29.4%	-29.2%	-28.8%	-27.9%	-26.3%	-25.5%	-22.0%	-19.4%	-14.9%
2010	59.3%	57.9%	54.3%	51.1%	47.9%	44.8%	42.3%	40.4%	38.4%	35.6%	36.6%	35.4%
2011	26.0%	27.5%	27.7%	30.2%	33.3%	36.0%	36.5%	36.4%	37.2%	35.0%	32.3%	29.0%
2012	6.6%	7.7%	6.9%	4.4%	1.6%	-1.7%	-2.6%	-5.6%	-6.2%	-6.4%	-6.3%	-6.6%
2013	-1.2%	-2.8%	-6.4%	-7.0%	-6.4%	-6.1%	-6.1%	-6.2%	-6.2%	-5.5%	-5.2%	-3.9%
2014	-5.9%	-2.5%	1.1%	-3.2%	-8.1%	4.4%	-6.4%	10.7%	3.9%	-2.6%	-14.6%	-14.9%
2015	-8.5%	-16.8%	-10.3%	-8.3%	-14.0%	-12.3%	-18.8%	-12.1%	-17.6%	-20.7%	-18.3%	-17.5%
2016	-20.9%	-7.1%	-13.4%	-12.4%	-9.7%	-4.0%	-16.9%	-0.7%	-0.2%	5.1%	21.4%	16.0%
2017	27.9%	11.5%	24.3%	13.6%	24.1%							

Sumber: BPS dan DJBC, 2017